

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan segala konsekuensinya menuntut transformasi *mindset* dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya *dynamic governance* dalam mengimbangi perubahan yang semakin cepat, dan persaingan global yang semakin tajam pada berbagai sendi kehidupan, sebagai konsekuensi runtuhnya konsepsi ruang dan waktu antara berbagai negara bangsa di dunia. Penggunaan teknologi informasi akan lebih memudahkan birokrasi dalam memberikan pelayanannya, pelayanan yang cepat, murah dan tepat seperti yang diimpikan oleh sebagian masyarakat dan dunia usaha, hal ini secara agregat akan berimbas pada peningkatan daya saing. Kinerja organisasi pada berbagai levelnya dapat lebih difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil), setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya hingga pada organisasi secara keseluruhan. Masyarakat berharap pemimpin birokrasi pada berbagai level tingkatannya, baik di pusat maupun di daerah, memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama untuk mewujudkan *shared vision* melalui keteladanan dan kemampuan dalam mengayuh perubahan, dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, terus mengembangkan Sumber Daya Manusia yang inovatif dan membangun budaya organisasi yang kondusif dalam meningkatkan daya saing.

Sebagai pelayan publik, Aparatur Sipil Negara harus bisa menggunakan perangkat Teknologi Informasi, sehingga semakin baik pula dalam memberikan

layanan publik. Dengan penerapan sistem elektronik berbasis online, seperti *e-Musrenbang*, *e-Budgeting*, *e-Planning*, dan aplikasi elektronik lainnya sampai pada e-Kinerja, mengharuskan Aparatur Sipil Negara menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membawa bangsa Indonesia menuju paradigma baru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Secara umum dan sederhana, era revolusi industri 4.0 adalah sebuah kondisi perubahan sosial dan tatanan kehidupan yang mengandalkan perpaduan antara jaringan internet dan sistem Teknologi Informasi. Salah satu upaya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah dengan peningkatan keterampilan, daya saing, produktivitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Risdianto, 2019 : 501).

Berdasarkan laporan dari berbagai organisasi maupun pemberitaan terjadi kenaikan pelaporan kasus UU ITE, seperti yang diberitakan oleh media asing *Defending digital rights in Southeast Asia* terjadi kenaikan pelaporan kasus ditahun 2020 hingga tahun 2021. Sekitar 67 persen (57 kasus menjadi 93 kasus) terjadi di tahun 2021. Angka rata-rata kasus UU ITE. Sebanyak 82 persen (73 orang) dari kasus tersebut dilakukan oleh laki-laki sedangkan sisanya 18 persen (27 orang) dari kasus yang dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi (KomInfo) sampai saat ini Indonesia menempati peringkat ke-6 didunia sebagai pengguna media komunikasi dan informasi yang berbasis internet pada media sosial.

Organisasi yang di percaya sebagai pengelola komunikasi dan teknologi informasi di Kota Pematang Siantar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar juga berperan sebagai melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga menjadi pusat informasi bagi kebutuhan pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar memiliki Visi “Tewujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas” sedangkan Misi :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat sejahtera humanis agamis dan beradab dengan menghargai *local wisdom* dan keberagaman yang berkualitas;
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa UMKM dan koperasi yang mandiri kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid 19;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif efisien bersih responsive melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*;
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara;
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang pengembangan infrastruktur keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Dari program yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dalam mencapai visi misi tersebut belum cukup maksimal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya realisasi program yang sudah direncanakan dalam mewujudkan misi tersebut sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan

masyarakat dalam menggunakan media komunikasi dan informasi sehingga terjadi kebebasan yang tidak terkontrol yang memicu beberapa pelanggaran etika dalam informasi. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik meneliti Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mewujudkan Informasi yang Beretika dan Bertanggung Jawab di Kota Pematang Siantar.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni:

Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab pada Masyarakat pengguna Media Sosial di Kota Pematang Siantar?.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab pada Masyarakat pengguna Media Sosial di Kota Pematang Siantar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kota Pematang Siantar. Di samping itu dapat melatih kemampuan peneliti dalam meneliti, menganalisis, dan menyajikannya dalam bentuk laporan karya ilmiah yaitu skripsi.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Pematang Siantar

Karya ilmiah ini dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kota Pematang Siantar sehingga penyelenggaraan tata pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Pematang Siantar berjalan dengan baik.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan program studi administrasi publik, terutama terkait dengan Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kota Pematang Siantar. Selain itu, sebagai sumber daya akomodasi bahwa kepentingan publik sangat diperlukan dalam status sosial yang tidak terlepas dari pengaruh teknologi perkembangan zaman.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2012 : 31) landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Setiap penelitian memerlukan landasan atau kejelasan berfikir dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu perlu disusun landasan teori yang menggambarkan sudut pandang masalah yang akan disoroti Nawawi (1995 : 40) dalam Harianda (2011). Dalam penelitian ini, diperlukan landasan teori yang dapat digunakan sebagai kerangka dasar dalam penelitian. Kerlinger menyebutkan teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proporsi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variable untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2007 : 6) dalam Harianda (2011).

2.2. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2012:212), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Soerjono Soekanto (2002 : 242) menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu

proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Menurut Ali (2000 : 148) mengenai peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Komarudin (1994 : 13) dalam Siregar (2019) buku “ensiklopedia manajemen” mengungkap definisi peran sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, M, 1998 : 286).

Menurut Hamalik (2007: 33) peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Dalam pendapat Soerjono dan Soekanto (2004:551) menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari posisi seseorang untuk mengimplementasikan seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Ketika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, menjalankan

fungsinya. Peran adalah aspek dinamis dari situasi (negara). Peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (John Scott, 2011: 228).

Menurut C. P. Chaplin (1981: 10) peran adalah fungsi individu atau peranannya dalam satu kelompok atau institusi. Menurutnya, peran juga merupakan fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu atau yang menjadi ciri atau sifat dari dirinya. Menurut Kozier Barbara (1995 : 21) dalam Hidayaturrahman (2020) berpendapat bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran juga diartikan sebagai bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

2.3. Pengertian Komunikasi Publik

Komunikasi publik diartikan sebagai kegiatan memahami, merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kampanye komunikasi yang berhasil dalam sebuah kerangka kerja untuk melayani kepentingan umum. Program-program dalam komunikasi publik menggunakan komunikasi untuk menginformasikan atau mempersuasi, membangun hubungan, dan untuk mendorong dialog terbuka dalam organisasi atau komunitas terhadap solusi jangka panjang. Hal ini

dilakukan dengan menyusun pesan yang sukses melalui penerapan penelitian, teori, pengetahuan teknis, dan prinsip desain suara. Hidup kita tidak terlepas dari komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, baik langsung maupun melalui media, baik berupa tulisan, suara, gambar, logo, lambang atau kodekode tertentu. Bahkan kebijakan tentang kenaikan gaji pegawai misalnya, adalah merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang bertujuan agar para pegawai dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya lebih baik lagi, termasuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi tidak terpisahkan dalam hidup dan kehidupan manusia. Kita tak dapat untuk tidak berkomunikasi (*we cannot not to communicate*), karena seluruh perilaku kita adalah komunikasi dan memiliki nilai pesannya sendiri (DepdagriLAN, 2007 : 2) dalam Dr. Hardiyansyah (2015 : 11).

Menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005) dalam Budi Subandriyo, S.ST, M.Stat (2020 : 1), komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Adapun tujuan komunikasi publik adalah untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran. Menurut Judy Pearson dan Paul Nelson (2009) dalam Nofri Affandi (2019 : 6) mendefinisikan komunikasi publik atau public speaking sebagai proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna dalam sebuah situasi dimana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal dan terkadang berupa tanya jawab. Dalam komunikasi

publik, sumber menyesuaikan pesan yang dikirimkan kepada penerima pesan dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang maksimal.

Komunikasi publik adalah salah satu dari konteks komunikasi yang menekankan pada sumber pesan dimana seseorang bertanggung jawab dalam proses penyampaian informasi kepada penerima pesan atau khalayak. Komunikasi publik merujuk pada kampanye komunikasi yakni kegiatan yang menggunakan berbagai teori dan strategi komunikasi untuk mempengaruhi khalayak luas dengan cara-cara yang dapat diukur. Komunikasi publik merujuk pada public speaking berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan kita, misalnya dalam bidang pendidikan, profesional, politik, dan lain sebagainya. Public speaking umumnya mengupas hal-hal yang berkaitan dengan cara berbicara di depan umum seperti bagaimana cara menyusun pesan informatif maupun pesan persuasif kepada khalayak. Komunikasi publik adalah alat strategis yang terdiri dari penggunaan berbagai media, kampanye diseminasi informasi yang komprehensif untuk menyampaikan pesan tertentu kepada khalayak tertentu. Dibandingkan dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok, komunikasi publik merupakan jenis komunikasi yang bersifat konsisten, formal, serta berorientasi pada tujuan.

Dalam teori Komunikasi Publik Difussion of Innovations Theory (Teori Difusi Inovasi) Teori difusi inovasi yang dicetuskan oleh Everett M. Rogers (1995) dalam Siti Fatonah / Subhan Afifi (2008 : 44) adalah teori yang menggambarkan bagaimana ide atau produk baru, ataupun perilaku positif berkembang melalui sebuah komunitas atau struktur sosial. Teori ini

mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa cepat ide atau perilaku diadopsi. Adopsi ide baru atau difusi sebuah inovasi bergantung pada karakteristik inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Teori difusi inovasi juga menyoroti ketidakpastian yang terkait dengan perilaku baru dan membantu program kampanye *public* mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi ketidakpastian.

2.4. Pengertian Informasi

Menurut Kelly (2011 : 10), informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi. Sedangkan menurut Carlos Coronel and Steven Morris (2016 : 4) informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya. Informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diolah sehingga mempunyai makna. Informasi merupakan hasil dari pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna bagi yang menerimanya, sebagaimana dipaparkan oleh Vercellis (2009: 7) dalam Rusdiana dan Irfan (2014), "*Information is the outcome of extraction and processing activities carried out on data, and it appears meaningful for those who receive it in a specific domain*". Wawan dan Munir (2006: 1) dalam Rusdiana dan Irfan (2014) mengemukakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang menggambarkan kejadian nyata dengan lebih berguna dan lebih berarti.

Informasi dapat dijelaskan kembali sebagai sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data menjadi lebih mudah dimengerti dan bermakna yang menggambarkan kejadian dan fakta yang ada. Raymond Mc.leod (1995 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014) mengungkapkan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Tata Sutabri (2005 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014) menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Anton M. Meliono (1994 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014) mendefinisikan informasi adalah data yang sudah diproses untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Gordon B. Davis (1998 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014) menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Lani Sidharta (2001 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014) menyatakan bahwa informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang bisa berguna untuk membuat keputusan. Menurut Jogiyanto H.M. (2002 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014), bahwa informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. George (1993 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014) mendefinisikan informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Menurut

Susanto (2002 : 75) dalam Rusdiana dan Irfan (2014), informasi merupakan hasil dari pengolahan data, tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah informasi bagi orang tersebut.

Davis dalam Putra dan Sutjahjo (2017 : 88), dalam Irwanto (2021) memaparkan bahwa informasi adalah kumpulan dalam bentuk data yang sudah diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti bagi penerimanya atau pembacanya dan memiliki manfaat untuk pengambilan keputusan di waktu yang tepat. Adapun pengertian informasi lebih singkatnya yang di jelaskan oleh Fauzis dalam Erniawati dan Setyawan (2019 : 88) dalam Irwanto (2021) bahwa informasi merupakan sebuah data yang sudah diproses atau diolah menjadi sebuah file dalam bentuk paragraf maupun gambar-gambar. Perbedaan sedikit antar pendapat Manurung (2019 : 88) dalam Irwanto (2021) dengan sebelumnya dari sudut pandang bentuk yang lebih menjurus ke fungsi informasi tersebut. Informasi dikatakan sebagai hasil dari pengolahan data kedalam bentuk yang lebih berguna lagi untuk penerimanya yang didalamnya menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan mampu digunakan untuk alat bantu pengambilan suatu keputusan. Sama halnya dengan Jogianto dalam (Sihombing dan Khumaini, 2016 : 88) dalam Irwanto (2021) bahwa, data yang sudah diolah dan menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya. Menurut Baridwan (2010 : 10) dalam Sumanang (2015) Informasi merupakan keluaran (*output*) dari suatu proses pengolahan data. Output tersebut telah tersusun dengan baik dan berarti bagi penerimaannya (*user information*), sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk

pengambilan suatu keputusan. Sementara menurut Wilkinson (2000 : 11) dalam Sumanang (2015) Informasi merupakan pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran.

Beberapa pandangan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu data atau objek yang diproses terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga dapat tersusun dan terklasifikasi dengan baik sehingga memiliki arti bagi penerimanya yang selanjutnya menjadi pengetahuan bagi penerima tentang suatu hal tertentu yang membantu pengambilan keputusan secara tepat.

2.5. Pengertian Beretika

Menurut Keraf dalam Pradnya (2022) etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya ta etha berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Menurut Maryani dan Ludigdo (2001 : 2) dalam Karnisa dkk (2015) etika sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau golongan manusia atau masyarakat atau profesi. Menurut Sumaryono (1995 : 3) dalam Sosiady dkk (2015) etika berkembang menjadi studi tentang

manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia

Jadi pengertian beretika adalah suatu sikap yang berdampak positif dan dapat menimbulkan karakteristik primadona masing masing manusia yang tidak bisa disamakan tampilan fisik namun karena dapat menimbulkan faktor lingkungan dan faktor pendidikan yang baik menimbulkan ciri khas kemanusiaan itu.

2.5.1. Macam-macam Etika

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik atau buruknya perilaku manusia, (Keraf 2009 : 20- 21) dalam Rianda (2018), yaitu :

1. Etika Deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.
2. Etika Normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Etika Umum

Etika Umum merupakan etika yang membahas mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan.

Secara umum norma umum dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu :

- 1) Norma sopan santun, norma ini menyangkut aturan pola tingkah laku dan sikap lahiriah seperti tata cara berpakaian, cara bertamu, cara duduk, dll. Norma ini lebih berkaitan dengan tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari, amak penilaiannya kurang mendalam karena hanya dilihat sekedar yang lahiriah.
- 2) Norma hukum, norma ini sangat tegas dituntut oleh masyarakat. Alasan ketegasan tuntutan ini karena demi kepentingan bersama. Dengan adanya berbagai macam peraturan, masyarakat mengharapkan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bersama. Keberlakuan norma hukum dibandingkan dengan norma sopan santun lebih tegas dan lebih pasti karena disertai dengan jaminan, yakni hukuman terhadap orang yang melanggar norma ini. Norma hukum ini juga kurang berbobot karena hanya memberikan penilaian secara lahiriah saja, sehingga tidak mutlak menentukan moralitas seseorang.
- 3) Norma moral, norma ini mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral menjadi tolok ukur untuk menilai tindakan seseorang itu baik atau buruk, oleh karena ini bobot norma moral lebih tinggi dari norma sebelumnya. Norma ini tidak menilai manusia dari satu segi saja, melainkan dari segi manusia sebagai manusia. Dengan kata lain norma moral melihat manusia secara menyeluruh, dari seluruh kepribadiannya. Di sini terlihat secara jelas, penilainya lebih mendasar karena menekankan sikap manusia dalam menghadapi tugasnya, menghargai kehidupan manusia, dan menampilkan dirinya sebagai manusia dalam profesi yang diembannya.

2. Etika Khusus

Etika Khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud, bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :

- 1) Etika Individual adalah menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

2.) Etika Sosial adalah berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

2.5.2. Manfaat Etika

Beberapa manfaat etika menurut Qohar (2012 : 13) dalam Rianda (2018), adalah sebagai berikut :

1. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral.
2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah.
3. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat.
4. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai.

2.6. Pengertian Etika Informasi

Etika informasi adalah cabang etika yang terpusat pada hubungan antara penciptaan (creation), pengorganisasian (organization), pemencaran (dissemination) dan penggunaan informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat dalam Basuki (2019).

2.6.1. Prinsip-Prinsip Etika Informasi

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar etika informasi berasal dari Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan termasuk hak atas kebebasan berbicara, akses universal terhadap informasi, hak atas pendidikan, hak atas privasi dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. (UNESCO dalam Ensiklopedia Dunia).

2.7. Pengertian Bertanggungjawab

Menurut Abu dan Munawar (2007 : 9) dalam Parlina (2016) tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang di larang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman. Wiyoto (2001 : 9) dalam Parlina (2016) menjelaskan tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang efektif berarti tanggapan yang memungkinkan anak mencapai tujuan-tujuan yang hasil akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka, misalnya bila akan belajar kelompok harus mendapat izin dari orang tua. Mampu bertanggung jawab jika melakukan tugas rutin tanpa diberitahu, dapat menjelaskan apa yang dilakukannya, tidak menyalahkan orang lain yang berlebihan, mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif, dapat berkonsentrasi pada pelajaran yang rumit, bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya, mempunyai minat yang kuat untuk tekun dalam belajar, menjalin komunikasi dengan sesama anggota kelompok,

menghormati dan menghargai aturan, bersedia dan siap mempresentasikan hasil kerja kelompok, memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat, mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat.

Menurut Schiller & Bryan (2002 : 10) dalam Parlina (2016) tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Mudjiono (2012 : 10) dalam Parlina (2016) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat.

2.7.1. Aspek-Aspek Tanggung jawab

Menurut Burhanudin (2000 : 43) dalam Ni Ketut Sudani, dkk (2013), tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Aspek-aspek tanggung jawab menurut Burhanudin sebagai berikut :

1. Kesadaran memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri
2. Kecintaan atau Kesukaan memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang hubungan Antara diri yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya. Dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain.
3. Keberanian memiliki kemampuan bertindak independen, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai. Dari aspek- aspek yang telah dijelaskan diatas bahwa aspek tanggung jawab merupakan kesadaran akan etik, nilai, moral, kemampuan dalam perencanaan, memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri dalam kemampuan

yang di miliknya serta memiliki hubungan interpersonal yang baik (empati, bersahabat) dan kemampuan bertindak independen.

2.7.2. Jenis Tanggung Jawab

Menurut Tirtorahardjo (Tirtorahardjo (2005: 8) dalam Dinia Ulfa (2014)

tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari :

1. Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hakaknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam.

2. Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara dan segala aktivitasnya, manusia terikat oleh masyarakat, lingkungan dan negara. Maka dari itu segala tingkah laku ataupun perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain.

3. Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Manusia di alam semesta ini tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada yang menciptakan yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib mengabdikan kepadaNya dan juga menanggung tuntutan norma-norma Agama serta melakukan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan misalnya yaitu mempunyai perasaan berdosa dan terkutuk.

Berdasarkan penjelasan tentang jenis-jenis tanggung jawab tersebut, maka tanggung jawab belajar mahasiswa termasuk dalam jenis tanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Artinya, masyarakat harus bisa menanggung kata

hatinya untuk bersedia melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang harus bisa berkomitmen untuk membiasakan diri dalam belajar dengan baik dan disiplin.

Jenis tanggung jawab meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri meliputi tingkah laku, perasaan, menentukan hak-haknya. Tanggung jawab kepada masyarakat, meliputi aturan, norma- norma yang ada dimana seseorang berada. Kemudian tanggung jawab terhadap Tuhan, terkait dengan Agama yang dianutnya.

2.7.3. Ciri- ciri Tanggung Jawab

Ciri-ciri seorang yang bertanggung jawab menurut Anton Adiwiyato (2001 : 89) dalam Astuti (2005 : 27), Ulfa (2014) antara lain yaitu :

- 1) Melakukan tugas rutin tanpa harus diberi tahu
- 2) Dapat menjelaskan apa yang dilakukannya
- 3) Tidak menyalahkan orang lain yang berlebihan
- 4) Mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif
- 5) Bisa bermain atau bekerja sendiri dengan senang hati
- 6) Bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya
- 7) Punya beberapa saran atau minat yang ia tekuni
- 8) Menghormati dan menghargai aturan
- 9) Dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang rumit
- 10) Mengerjakan apa yang dikatakannya akan dilakukan
- 11) Mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat.

Pendapat lain dari Zubaedi (2011: 40) dalam Dinia Ulfa (2014) menyatakan bahwa tanggung jawab juga ditandai dengan adanya sikap yang rasa memiliki, disiplin, dan empati. Rasa memiliki maksudnya seseorang itu mempunyai kesadaran akan memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan; disiplin berarti

seseorang itu bertindak yang menunjukkan perilaku yang tertib dan patuh pada berbagai peraturan; dan empati berarti seseorang itu mampu mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan dan pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain dan tidak merasa terbebani akan tanggung jawabnya itu.

2.7.4. Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab

Menurut pendapat Sudani, dkk (2013 : 3) dalam Ulfa (2014) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa :

- (1) kurangnya kesadaran mahasiswa tersebut akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya,
- (2) kurang memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, dan
- (3) layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Guru BK dalam menangani perilaku tanggung jawab belajar secara khusus belum terlaksana secara optimal di kelas.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi penelitian yang berasal dari jurnal maupun skripsi ataupun tesis yang sejalan dan menjadi landasan awal penelitian yang dilakukan.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Jurnal / Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	1. Septian Eko Haryansyah (2021) 2. Zulviar Anas	Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang	Penelitian Kualitatif	Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya belum merata dengan dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah melakukan beberapa program dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab seperti Edukasi Internet sehat dan cakap, Stop bullying, Pelatihan kepada pegawai hingga melakukan teguran dan pemblokiran terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

2	Jhon Carlos Purba (2017)	Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Provinsi Riau	Penelitian Kualitatif	Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Provinsi Riau sudah berjalan cukup baik namun pelaksanaannya belum merata dengan dimna Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau telah melakukan beberapa program dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab seperti edukasi internet sehat dan cakap, Stop bullying, Pelatihan kepada pengawai hingga melakukan teguran dan pemblokiran terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
3	Sitti Atirah H. Surullah (2023)	Transparansi Informasi dan Komunikasi Publik dalam Media Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Penelitian Kualitatif	Transparansi dalam dinas komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan mengukur teori milik krina ditemukan bahwa alur media dan penyaringan media kepada masyarakat sudah terlaksana sebagaimana Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur yakni Undang-undang nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Diskominfo Kota Makassar melakukan kolaborasi antar pers, dimana kolaborasi tersebut dapat mewujudkan sinergitas dan menjamin ketersediaan informasi yang jelas. Namun dalam pelaksanaannya tantangan yang masih

				terus dan akan terus dihadapi dalam mewujudkan transparansi serta keterbukaan informasi publik adalah memberantas hoaks.
--	--	--	--	--

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1) Persamaan

- a) Penelitian di Lembaga atau Instansi yang sama yaitu kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b) Menggunakan metode penelitian kualitatif.
- c) Membahas tentang Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab.

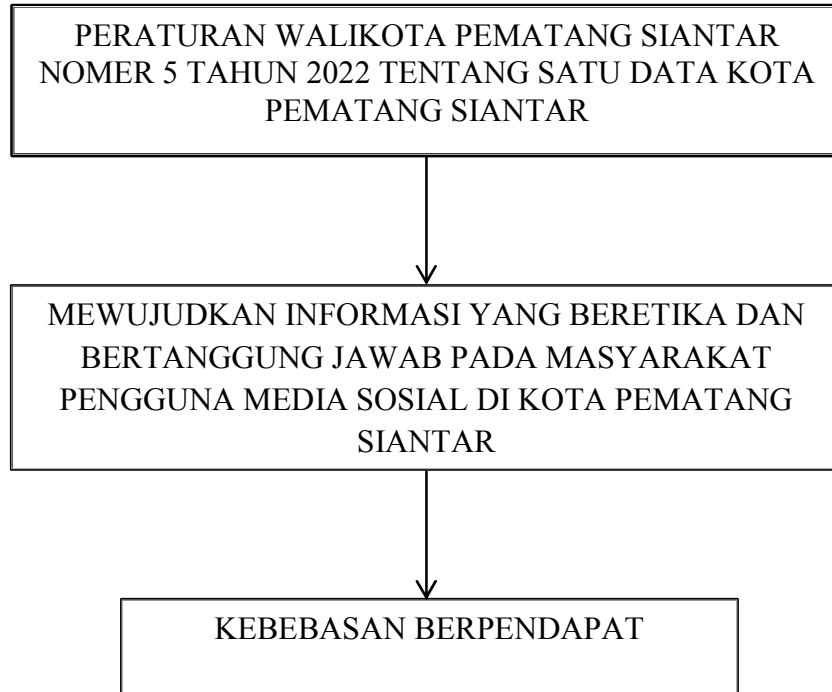
2) Perbedaan

- a) Lokasi penelitian
- b) Waktu penelitian
- c) Rumusan masalah penelitian

2.9. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian tentang Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab pada masyarakat pengguna media sosial di Kota Pematang Siantar. Menurut Echo kerangka berpikir adalah suatu dasar pemahaman yang akan memengaruhi dasar dari pemahaman orang lain. Oleh karena itu, kerangka berpikir dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran yang akan dituangkan ke dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk karya tulis. Adapun ketentuan hukum acuan kerangka berpikir peran Dinas Komunikasi dan Informatika Pematang Siantar berada atas Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomer 5 tahun 2022 tentang Satu Data Kota Pematang Siantar, di jelaskan a) bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan: b) bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar melalui penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Satu Data Kota Pematang Siantar Sebagai berikut :

2.9. Kerangka berpikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang dibutuhkan dan berusaha menggambarkan serta menginterpretasi objek yang sesuai dengan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.

Menurut Moleong (2017 : 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi (2019 : 218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Pemilihan lokasi dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kota Pematang Siantar.

B. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Pematang Siantar. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada saat pengambilan data pertama yaitu Mei sampai Agustus 2023.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jenis Kegiatan	Maret	April	Juni	Juli	Agust	Sept
1. Persiapan Penelitian						
a. Pengajuan Judul						
b. Penyusunan Proposal						
2. Seminar Proposal						
a. Revisi dan Perijinan						
3. Perencanaan Penelitian						
4. Pelaksanaan Penelitian						
5. Penyusunan Laporan						
6. Ujian dan Revisi						

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang diteliti. Data atau informasi yang diteliti harus ditelusuri seluas-luasnya (sedalam mungkin) agar peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh, maka didalam penelitian ini menggunakan informan yang dipilih. Pertama, menentukan beberapa informan yang dianggap mengerti tentang masalah yang ingin diteliti, selanjutnya dari beberapa informan yang ada akan memberikan petunjuk informan selanjutnya untuk diwawancarai ataupun observasi, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan kunci, yaitu informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Johannes Sihombing S, STP. M.Si (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pematang Siantar)
- b. Informan utama, yaitu individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “actor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Bapak Rigold Nainggolan S. Kom (Pranata Komputer Ahli pertama)
- c. Informan tambahan, yaitu individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang

tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Bapak Daniel Rumandar Parulian Purba SE., (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik).

3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau cara yang sistematis dalam pengumpulan data, pencatatan, dan penyajian fakta untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan dan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

3.4.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dengan para responden yang berpotensi untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Data primer yang dikumpulkan dengan teknik :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan terhadap objek observasi dengan langsung merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topic penelitian Bungin (2010:115). Pedoman observasi ini berupa informasi tentang bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informatika mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab di Kota Pematang Siantar.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk penelitian yang dilakukan memperoleh sejumlah data dengan melakukan tanya jawab dan dialog atau diskusi langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan/informan. Menurut Bungin (2008 : 108) menyatakan bahwa : Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sedangkan wawancara bertahap ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Informan yang digali terkait dengan Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang Beretika dan Bertanggungjawab pada Masyarakat pengguna Media Sosial di Kota Pematang Siantar.

3.4.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Arikunto (2006 : 231) menyatakan bahwa, dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam metode ini yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati sehingga untuk menggunakan metode ini peneliti memegang *check-list* untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Menurut Sugiyono (2018 : 476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Bentuk dokumentasi yang bisa digunakan oleh peneliti yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Menurut Nasution (2003 : 115) berpandangan triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

